

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pascakrisis moneter tahun 1998, pemerintah Indonesia melakukan perubahan guna mewujudkan *good governance*¹ dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah (Maryam, 2016). Salah satu perbaikan yang telah dilakukan adalah terkait keuangan negara. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjadi tonggak reformasi keuangan di Indonesia.

Reformasi yang terjadi pada sektor keuangan negara juga disertai dengan reformasi pada sektor perencanaan dan penganggaran (Rezariski, 2020). Reformasi pada perencanaan dan penganggaran negara dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010.tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Rencana kerja dan anggaran disusun dengan

¹ *Good Governance* dapat diartikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan efisiensi sehingga dapat meminimalisir terjadinya korupsi baik secara politik maupun adminisitrasi (Handayani & Nur, 2019).

menggunakan tiga pendekatan yaitu anggaran terpadu², kerangka pengeluaran jangka menengah/KPJM³ dan penganggaran berbasis kinerja atau PBK (Pemerintahan Republik Indonesia, 2010). Dalam hal pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, ketiga pendekatan tersebut berfokus pada penganggaran berbasis kinerja. PBK menunjukkan antara alokasi sumber daya dan kinerja yang diharapkan, dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian kinerjanya (Wijayanti et al., 2012). Sistem penganggaran ini mengaitkan antara *input*, *output*, dan *outcome* yang ingin dicapai serta menekankan efektivitas dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan (Sulistio, 2013).

Dalam pendekatan PBK, terdapat tiga instrumen yang digunakan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, yaitu indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja (Pemerintahan Republik Indonesia, 2010). Indikator kinerja berkaitan dengan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat atau besaran pencapaian dari *output* dan *outcome* yang ditetapkan (Kristiyanti, 2012). Standar biaya merupakan satuan biaya yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan kebutuhan anggaran dengan harga yang paling ekonomis dengan memperhatikan kualitas produk (Wijayanti et al., 2012). Evaluasi kinerja berkaitan dengan kegiatan penilaian terhadap capaian sasaran kinerja, konsistensi pada

² Anggaran terpadu (*unified budget*) pada dasarnya merupakan anggaran yang memuat semua kegiatan instansi pemerintah dalam APBN yang disusun secara terpadu (Ariwibawa et al., 2018).

³ KPJM adalah suatu kerangka kerja yang secara eksplisit menunjukkan keterkaitan antara kedisiplinan pengeluaran pemerintah melalui anggaran untuk membiayai kebijakan prioritas atau kondisi keterbatasan anggaran (*budget constraint*) (Parhusip, 2018).

perencanaan, implementasi dan realisasi penyerapan anggaran disertai rumusan alternatif solusi jika diperlukan (Aini, 2019).

Terbentuknya informasi kinerja merupakan salah satu hasil dari implementasi PBK. Pada penerapannya diperlukan indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat kinerja (Ulum, 2012). Indikator kinerja dapat ditemukan dalam dokumen pelaksanaan anggaran seperti daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan dokumen pelaporan kinerja seperti laporan kinerja pada setiap satuan kerja. Dalam mengukur kinerja sebuah organisasi, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu *activity-based costing* (ABC), *the tableau de bord* (TdB), *productivity measurement and enchancement system* (ProMES), *performance pyramid system* (PPS), dan *balance scorecard*. (Cahyono, 2000).

Pada sektor pemerintah, pendekatan yang digunakan adalah *Balance Scorecard* (BSC)⁴ dikarenakan pendekatan tersebut mengukur kinerja secara komprehensif dan berimbang dari segi keuangan dan nonkeuangan (Fitriyani, 2014). BSC mengukur kinerja berdasarkan empat perspektif, yaitu perspektif *finansial*, perspektif *costumer*, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran (Ciptani, 2000). Pada Kementerian Keuangan, penerapan konsep BSC didasari dengan program reformasi birokrasi berskala nasional yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada Inpres tersebut diatur secara umum bahwa seluruh kementerian wajib

⁴ *Balance Scorecard* (BSC) adalah sistem manajemen untuk menerjemahkan tujuan strategis organisasi ke dalam serangkaian tujuan kinerja yang kemudian diukur, dipantau dan diubah untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi terpenuhi (Tandiontong & Yolanda, 2011)

menyusun penetapan indikator dan target kinerja yang dapat menjelaskan keberhasilan pencapaian kinerja organisasinya baik berupa *output* maupun *outcome* (Risman, 2016).

Dengan adanya penerapan BSC pada unit Kementerian Keuangan, tentu akan memiliki implikasi terhadap indikator kinerja pada laporan kinerja (LAKIN) sehingga mempengaruhi kesesuaian dengan indikator kinerja pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) (Fitriyani, 2014). Kesesuaian informasi kinerja ini diperlukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman pengartian informasi kinerja sehingga *output* dapat tercapai secara maksimal (Imelda R. H. N, 2004). Dengan adanya fenomena tersebut, dilakukan penelitian atas kesesuaian indikator kinerja antara DIPA dan LAKIN ditinjau dari jumlah, *nomenklatur*, dan target capaian. Penelitian dilakukan di KPPN Metro, yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), instansi vertikal Kementerian Keuangan. Hasil dari penelitian ini akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir (KTTA) ini.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang akan di bahas pada KTTA ini dituangkan dalam rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan di bahas dalam penulisan KTTA ini, yaitu:

1. Bagaimana kesesuaian informasi kinerja antara DIPA dan LAKIN KPPN Metro tahun 2018-2020?
2. Apa saja permasalahan kesesuaian informasi kinerja dan bagaimana upaya yang dilakukan KPPN Metro dalam meminimalisasi permasalahan informasi kinerja pada DIPA dan LAKIN tahun 2018-2020?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari KTTA ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang akan dibahas. Adapun tujuan penulisan KTTA ini, yaitu:

1. Mengetahui kesesuaian informasi kinerja pada DIPA dan LAKIN KPPN Metro tahun 2018-2020.
2. Mengetahui permasalahan kesesuaian informasi kinerja, faktor penyebab, dan upaya yang dilakukan dalam meminimalisasi permasalahan informasi kinerja pada DIPA dan LAKIN KPPN Metro tahun 2018-2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup pembahasan KTTA ini akan berfokus pada analisis penyajian dan kesesuaian informasi kinerja yang ada pada dokumen anggaran dan dokumen pelaporan kinerja KPPN Metro tahun anggaran 2018-2020 yang ditinjau dari jumlah dan level, *nomenklatur*, dan target capaian indikator kinerja. Dokumen anggaran yang dimaksud adalah DIPA dan dokumen pelaporan kinerja yang LAKIN. KPPN Metro dipilih sebagai objek karena belum ada penelitian terkait kesesuaian informasi kinerja sehingga belum disimpulkan apakah terdapat kesesuaian informasi kinerja pada DIPA dan LAKIN KPPN Metro. Periode tahun anggaran 2018-2020 dipilih agar data yang tersedia mencerminkan keadaan terbaru dan data yang diolah menjadi lebih kuat serta tidak bias sehingga bisa dikomparasikan.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik praktis dan akademis bagi pembaca. Secara praktis, KTTA ini dapat menjadi salah satu sarana

evaluasi bagi tim perencanaan serta pertanggungjawaban satuan kerja agar sinkronisasi penyajian informasi kinerja pada DIPA dan LAKIN menjadi lebih baik dan sesuai sehingga tujuan implementasi penganggaran berbasis kinerja dapat terealisasi secara optimal. Secara akademis, KTTA ini dapat menjadi tambahan referensi bagi pembaca mengenai kesesuaian informasi kinerja pada dokumen anggaran dan dokumen pelaporan kinerja serta menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoretis telah dipelajari saat perkuliahan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

KTTA ini terdiri dari empat bab dan tiap bab terdiri dari subbab-subbab dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi gambaran umum KTTA, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan. Latar belakang membahas reformasi perencanaan dan penganggaran, penerapan PBK di Indonesia, informasi kinerja dan urgensi kesesuaiannya. Rumusan masalah berisi pertanyaan mengenai penyajian dan kesesuaian, dan permasalahan serta solusi terkait informasi kinerja pada DIPA dan LAKIN. Tujuan penulisan membahas hal yang akan dicapai dari penelitian ini. Ruang lingkup penulisan berisi batasan dalam penulisan KTTA. Manfaat penulisan membahas kegunaan dari pengkajian rumusan masalah. Sistematika KTTA berisi struktur bab dan subbab KTTA ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab dua membahas tiga teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan, yaitu informasi kinerja pada PBK, dokumen pelaksanaan anggaran, dan dokumen

pelaporan kinerja. Informasi kinerja pada PBK akan membahas mengenai instrumen PBK terutama indikator kinerja. Dokumen pelaksanaan anggaran membahas tentang DIPA meliputi dasar penyusunan, pengertian, tujuan, fungsi, dan alur penyusunannya. Dokumen pelaporan kinerja membahas tentang LAKIN meliputi dasar penyusunan, pengertian, tujuan, dan formatnya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab membahas tiga subbab yaitu metode penelitian, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan hasil. Metode penelitian meliputi metode pengumpulan dan pengolahan data pada KTTA ini. Gambaran umum objek berisi profil singkat KPPN Metro. Pembahasan hasil berisi penyajian dan kesesuaian informasi kinerja dan permasalahan, faktor penyebab, dan upaya meminimalisasinya.

BAB IV SIMPULAN

Bab terakhir meringkas dan menyimpulkan hasil dari pembahasan pada bab tiga. Simpulan merupakan ringkasan atas jawaban atas dua rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab satu.